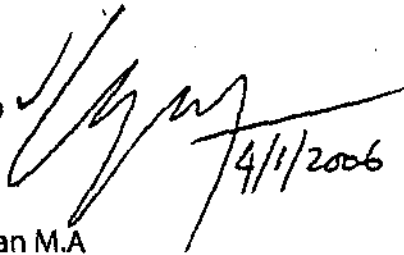


ACEH

KEMBALI KE MASA DEPAN

Prof. AD Pirous
Dr. Abdul Hadi WM
Dr. Agus Budi Purnomo
Bedu Saini
Dr. Hasballah M. Saad
Prof. Dr. Teuku H. Ibrahim Alfian M.A
Ir. Kamal A. Arif M.Eng
Prof. Dr. M. Junus Melalatoa
Dr. Eng. Ir. T. Abdullah Sanny, M.Sc
Prof. Dr. Teuku Jacob, M.S., M.D., D.Sc



4/1/2006



IKJ PRESS



KATA



PT. CUDANG GARASI TMA



TODAK
GAMING PSYCHOLOGY
1997

Aceh Kembali ke Masa Depan

Hak Cipta pada IKJ Press, Cetakan Pertama: 2005

ISBN 979-3778-27-X ✓

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Kata Pengantar : Sardono W. Kusumo
Gambar Sampul : Mahdi Abdullah
Disain Sampul : Iwan Gunawan
Penyunting naskah : Bambang Bujorio
Penata letak : Cyprianus Jaya Napiun

Diterbitkan dengan kerja sama KataKita, Yayasan SET, PT Gudang Garam

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

KUSUMO, Sardono W.

Aceh Kembali ke Masa Depan/Sardono W. Kusumo, selanjutnya nama-nama A.D. Pirous, Abdul Hadi WM, Teuku Abdullah Sanny, Agus Budi Purnomo, Hasballah M. Saad, Teuku Ibrahim Alfian, Teuku Jacob, Kamal A. Arif, Muhammad Junus Melalatoa, Bedu Sani – Cet. 1 – Jakarta: IKJ Press bekerjasama dengan KataKita, 2005, 416 hlm

Dicetak oleh SMK Grafika Desa Putera
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Daftar Isi

Kata Pengantar Prof. Sardono W. Kusumo	vii
Memahami Aceh Sebuah Perspektif Budaya Prof. Dr.M. Junus Melalatoa	1
Refleksi Gempa-Tsunami: Kegemilangan dalam Sejarah Aceh Prof. Dr. Teuku Haji Ibrahim Alfian, MA	81
Membangun Kembali Aceh: Tanah Kalam dan Hikayat Prof. Dr. Teuku Jacob, M.S., M.D., D.Sc	151
Aceh dan Kesusastraan Melayu Dr. Abdul Hadi W.M.	173
Hikayat Prang Sabil Dr. Hasballah M. Saad	277
Tiga Percakapan tentang Aceh Prof. A.D. Pirous	189

Saksi Mata Foto-foto Bedu Saini	315
Arketipe Arsitektural Banda Aceh Kamal A. Arief, M. Eng	331
<i>"Blue-print"</i> bagi Banda Aceh Dr. Agus Budi Purnomo	363
Membangun Paradigma Baru Indonesia: Peradaban Berbasis Akrab Bencana Dr. Eng.Ir.T. Abdullah Sanny	379
Para Penyumbang	399
Ucapan Terimakasih	403

"Blue-print" Kota Banda Aceh

Dr. Agus Budi Purnomo

Kota adalah karya manusia yang berfungsi untuk mewartahi kompleksitas dan kontradiksi yang ada pada diri manusia itu sendiri. Dengan berbagai kekurangannya "Blueprint" rekonstruksi Aceh akan menjaubkan Kota Banda Aceh dari idealisme tersebut. Tulisan ini membahas berbagai kemungkinan tersebut.

Arti Sebuah Kota

Kota adalah karya manusia dari manusia dan tentu saja untuk manusia. Oleh karena itu kota tidak sederhana seperti pemecah ombak atau kandang ayam. Layaknya seperti manusia itu sendiri kota adalah sebuah wadah bagi pluralitas kemanusiaan yang kompleks dan terkadang juga penuh kontradiksi. Jadi tak heran bila Mumford sang penulis karya klasik tentang kota, *Culture of the City*

(Miller, 1986) mengatakan bahwa kota adalah kumpulan berbagai jenis manusia. Bagi Mumford dan juga Bentham (Kelly, 2004) kota adalah wadah pertemuan berbagai peradaban yang berbeda, dan penuh dengan kemajemukan.

Apa saja segi kemanusiaan yang harus diwadahi oleh sebuah kota? Pertama kita harus bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan fisik penghuninya. Dalam hal ini sebuah kota harus bisa memberi ruang yang cukup bagi semua aspek kemanusiaan untuk berkembang. Dalam sebuah kota seorang manusia harus terlindungi dari marabahaya yang disebabkan oleh alam maupun sesama manusia. Dalam kota semua kebutuhan fisik manusia, seperti makan, minum, istirahat, rekreasi, dan tentu juga kesehatannya harus terpenuhi. Kebutuhan fisik dasar seperti itu bisa terpenuhi bila semua usaha dan kegiatan ekonomi serta mata pencaharian lainnya berjalan dengan baik. Kota juga harus mempunyai infrastruktur yang mewadahi dan mampu mendukung terselenggaranya kegiatan-kegiatan itu. Dalam hal ini kota bisa dianggap sebagai tempat di mana seluruh kegiatan konsumtif manusia bisa dipenuhi.

Kebutuhan manusia selain yang bersifat fisik ialah kebutuhan psikis. Bagi Mumford, Rousseau, Bentham, dan Huntington pemenuhan ini merupakan bagian penting manusia yang harus dipenuhi oleh sebuah kota, karena kota adalah asal-muasal dari sebuah peradaban (*civilization*), tempat manusia tidak lagi hidup dalam pola hukum rimba (Goetze, 1997).

Kebutuhan-kebutuhan psikis seperti rasa cinta terhadap suatu tempat atau oleh Tuan (1989) disebut "*topophilia*" menciptakan *collective-memory*. Memori kolektif ini menurut Geddes terbentuk

oleh adanya suatu usaha kumulatif manusia dalam mempertahankan hal-hal yang dianggap baik dan membuang hal-hal yang dianggap buruk (Meller, 1990).

Berbeda dengan kebutuhan fisik manusia, kebutuhan psikis bisa menjadi awal terbentuknya kesadaran perlunya keberlanjutan (*sustainability*) kota dan peradaban manusia. Sifat akumulatif peradaban manusia menolak pemutusan hubungan dengan masa lalu, karena semua yang telah diakumulasikan selama ini tak mungkin lepas dari masa lalu itu. Walaupun demikian, kedua jenis kebutuhan tersebut masih menempatkan manusia sebagai subyek sehingga dapat dikatakan sangat antroposentris.

Kebutuhan lain manusia yang muncul semasa dengan kesadaran tentang keterbatasan lingkungan ialah kebutuhan untuk mempertahankan keberlanjutan peradaban manusia. Kebutuhan tersebut muncul dari kesadaran bahwa kota adalah bagian dari alam yang lebih luas. Isu-isu seperti *sustainable-development*, *ecological footprint* sebuah kota dan lain-lain menjadi penting. Manusia sadar bahwa semua kebutuhan fisik dan psikis itu baru bisa dipertahankan bila segala sumber kehidupan yang selama ini telah menghidupkan kota dapat dijaga dan dilestarikan.

Krisis energi tahun 1970-an dan peningkatan emisi di atmosfer mengubah iklim global dan sistim produksi yang dibutuhkan manusia. Hal ini mendorong manusia untuk mulai mengubah gaya hidupnya, dan dalam jangka panjang aktivitas ini akan mengubah peradaban manusia secara menyeluruh.

Ketiga jenis kebutuhan tersebut saling berinteraksi dan juga sekaligus membentuk polarisasi di dalam sebuah kota. Walaupun sebuah kota diharapkan merupakan pertemuan ketiga kebutuhan itu

(Goetze, 1997), secara prosedural terjadi juga polarisasi yang secara keseluruhan memberi warna tertentu pada sebuah kota. Sebagai contoh, semakin rakus dorongan ekonomi, semakin besar pula kerusakan lingkungan dan *collective-memory* kota. Sebaliknya sebuah kota yang terlalu kaku pada *collective-memory*-nya akan kehilangan sumber ekonomi yang justru bila diperhatikan akan mendorong pelestarian dan kenangan bersama itu.

Masalahnya kini, demi terciptanya sebuah kota yang paripurna, bagaimana kita bisa memperkuat persamaan yang ada di antara tiga kutub tersebut dan mendekatkan serta mempertemukan polarisasi yang terjadi?

Melihat kenyataan yang telah disebutkan, untuk menjamin pluralitas dalam sebuah kota, Goetze mengusulkan konsep demokrasi sebagai alat agar ketiga kebutuhan manusia bisa secara sinergi diwadahi oleh sebuah kota. Menurut Goetze (1997), ketiga kebutuhan dapat saling bersinergi bila semua individu dalam membentuk kota bisa berpartisipasi secara berkesinambungan. Menurut Bentham, partisipasi baru bisa berhasil bila didasarkan pada transparansi atau suatu kondisi di kala semua orang bisa saling melihat secara jelas tanpa ditutupi ketidakjujuran. Sesuai dengan konsep itu Goetze (1997) tidak setuju dengan elitisme. Kalaupun elite ada, pihak tersebut harus berperilaku sebagai wasit yang mengatur komunikasi antar-*stake-holder* agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan tetap transparan. Bagi Bentham pemerintah hendaknya berperan sebagai elite sesuai dengan konsep tersebut.

Mungkin, sampai di sini, mereka yang membaca tulisan ini akan berkata, "Ah, itu hanyalah utopian." Tapi marilah kita coba berpikir,

apa akibatnya kalau idealisme yang sudah saya terangkan tersebut tak diperhatikan.

Awalnya tentu saja akan terjadi polarisasi kota. Hal ini sering diperkuat oleh *exclusionary-zoning* yang berkembang di awal tahun 1960-an, ketika setiap fungsi kota mempunyai ruangnya sendiri agar fungsi-fungsi itu tidak saling mengganggu. Tiap ruang yang bersifat eksklusif akan membentuk batas pelindung yang menghambat menyusupnya fungsi lain. Selanjutnya kota sebagai wadah bagi peradaban yang pluralis akan hilang, lantas kota pun tersegregasi, masyarakat terisolasi, teralienasi, terpecah, dan kemudian hilang. Kehancuran kota atau urbanitas seperti ini sudah dibahas oleh Hannah Arendt pada 1968 dalam karangannya yang berjudul "Man in Dark Time". Kegagalan manusia berpartisipasi dalam membentuk dan mempertahankan kota akan menyebabkan kehancuran sebuah komunitas, menghilangkan solidaritas, dan akhirnya merusak *locus* dari sebuah *agora* yang selama ini kita kenal sebagai kota. Pendapat Arendt tersebut bisa dianggap sebagai sebuah ramalan tentang fenomena-fenomena masa kini seperti kota berpagar (*fenced-city*, Marcuse, 2001), manusia-manusia *potato-couch*, dan diperparah dengan munculnya *public-sphere* yang baru, yakni internet.

Kota Banda Aceh

Melihat kenyataan-kenyataan itu adalah wajar bila kita menilai keberhasilan sebuah kota dalam memfasilitasi keberadaan kemanusiaan, menurut Venturi dan Brown, sangat kompleks dan kontradiktif. Kota tak bisa dipandang berhasil bila hanya mewadahi satu segi dari kemanusiaan dan meniadakan segi lainnya. Sebuah

kota yang baik harus bisa mempertemukan semua aspek kemanusiaan secara damai dan demokratis (Gotze, 1997).

Dengan dasar teori tersebut, mari kita ramalkan nasib Banda Aceh setelah tsunami bila "*Blueprint*" pemerintah dilaksanakan sepenuhnya.

Sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, *collective-memory* masyarakat Aceh sangat kuat, mengacu pada kejayaan Kesultanan Iskandar Muda yang dianggap sebagai masa kejayaan Aceh. Pada masa itu, kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga setempat seperti "*tuba-peut*" dan ulama-ulama juga tinggi. Hal ini ditandai oleh tingginya semangat kebersamaan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Salah satu contoh wujud dari semangat bersama yang tinggi itu adalah berdirinya Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam pada 1959.

Pada awal berdirinya Kopelma Darussalam tidak secara jelas membedakan antara Unsyiah (Universitas Syiah Kuala) dan IAIN Arraniry. Perumahan dosen dan fasilitas akademis kedua perguruan tinggi tidak dipisahkan lokasinya. Dosen Unsyiah di masa itu bertetangga dengan dosen IAIN Arraniry. Hubungan sosial antara penduduk Kopelma Darussalam dan desa-desa tetangga juga berjalan harmonis. Di kala itu dosen-dosen menjadi warga desa-desa tetangga dan melakukan kegiatan seperti layaknya warga desa lainnya.

Dengan idealisme sebagai kota pelajar dan mahasiswa, Kopelma Darussalam tidak hanya diperuntukkan bagi perguruan tinggi melainkan juga sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas. Selain adanya masalah-masalah tertentu seperti transportasi (hanya

ada satu bis milik Biro Perguruan Tinggi Kementerian P&K), komunikasi, dan listrik (listrik hanya dialirkan mulai pukul tujuh sore hingga 10 malam), semangat kebersamaan dapat dikatakan cukup tinggi.

Setelah tahun 1974, lembaga pemerintahan diformalkan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1974. Dalam proses formalisasi lembaga banyak pemimpin-pemimpin masyarakat kehilangan basis legal mereka, dan ini dapat dianggap sebagai awal dari rusaknya lembaga-lembaga kemasyarakatan di Aceh. Misalnya, banyak camat yang tidak berpendidikan formal harus menyerahkan kedudukannya kepada tamatan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (juga di Kopelma Darussalam) yang relatif muda dan belum mempunyai prestasi untuk dipercaya oleh masyarakat. Apalagi sebagian camat-camat baru itu tidak datang dari masyarakat setempat. Perubahan yang drastis seperti ini dapat dianggap sebagai usaha pusat untuk memperkuat pengaruh dan kontrolnya terhadap daerah. Secara perlahan hal ini menyebabkan segregasi sosial dan akhirnya mengarah pada segregasi spasial.

Kopelma Darussalam juga menerima dampak dari berlakunya UU No. 8 Tahun 1974 tersebut. Kopelma Darussalam tidak lagi mempunyai fasilitas bagi pelajar. Pendidikan dasar ditarik ke Kota Banda Aceh. Kopelma Darussalam kemudian diformalkan menjadi desa tersendiri, terpisah dari desa-desa tetangga. Akibatnya, hubungan yang harmonis yang sebelumnya ada antara penghuni Kopelma Darussalam dan desa-desa itu putus. Juga, Kopelma Darussalam dipisah menjadi dua: Unsyiah di Selatan dan IAIN Arraniry di Utara. Semua fasilitas IAIN Arraniry di selatan diserahkan ke Unsyiah, demikian pula sebaliknya. Kopelma

Darussalam mengalami fragmentasi spasial dan segregasi sosial, mengalami fenomena yang disebut oleh Aréndt (1968) sebagai menjauh dari idealisme komunitas yang tercantum pada namanya sebagai kota pelajar dan mahasiswa.

Bagaimana masa depan Kota Banda Aceh setelah gempa dan tsunami 26 Desember 2004 yang lalu? Bencana alam yang demikian dahsyat telah mengubah sebagian besar wilayah Kota Banda Aceh. Perubahan mendasar akan dialami oleh kota tersebut bila "*Blue-print*" karya Pemerintah Pusat diterapkan secara konsekuen.

Kenapa demikian?

Pertama, "*Blue-print*" tersebut dibuat tanpa mengacu pada peraturan yang ada (misalnya, UU No. 24 Tahun 1992). Bahkan istilah *blue-print* itu pun tidak mempunyai taksonomi resmi. Sifatnya sangat *top-down*, padahal dalam Undang-undang No. 24 Tahun 1992 jelas disebutkan bahwa pembuatan tata ruang provinsi atau kota merupakan wewenang gubernur atau bupati. Pembuatan tata ruang Kota Banda Aceh menurut Undang-undang tersebut jelas wewenang wali kota, bukan pemerintah pusat. Bahkan rencana tata-ruang yang ada dalam "*Blue-print*" telah mencampuradukkan skala rencana tingkat provinsi dengan rencana tingkat kota dalam satu dokumen.

Contoh lain yang menyangkut tata-ruang dalam "*Blue-print*", tidak lengkapnya arahan fungsi ruang. Pada Undang-undang No. 24 Tahun 1992 jelas disebutkan bahwa secara garis besar ada dua jenis fungsi ruang. Pertama, fungsi lindung, dan yang kedua fungsi budidaya. Dalam istilah teoritis tersebut fungsi budidaya adalah fungsi konsumtif manusia dan fungsi lindung menyangkut sustainabilitas sumber daya. Tata-ruang dalam "*Blue-Print*" hanya

menekankan perlunya fungsi lindung, melupakan bahwa kota juga harus memenuhi kebutuhan fisik dan psikis penghuninya. Lebih lanjut lagi, fungsi lindung tata-ruang "*Blue-print*" hanya sebagian dari keseluruhan sisi perlindungan terhadap alam yang tercantum dalam konsep *sustainability*.

Secara analitis, "*Blueprint*" juga tidak memperlihatkan dengan jelas tentang jenis data, teknik pendekatan, dan capaian yang lengkap. Sebagai contoh, secara teknis keterperincian peta-peta yang digunakan dalam analisis maupun produk tata-ruang dalam "*Blue-print*" tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2002 tentang keterperincian peta rencana tata ruang.

Kedua, berdasarkan kerangka teoritis yang telah diterangkan, "*Blue-print*" dibuat oleh pusat secara elitis, memperkecil partisipasi rakyat secara substantif. Pemerintah pusat sudah berubah menjadi "konsultan" dan tidak dapat lagi bertindak sebagai juri yang adil dan jujur untuk menengahi konflik-konflik horisontal dalam sebuah kota seperti yang diharapkan oleh Bentham. Lebih parah lagi, peran sebagai "konsultan" membuat pemerintah pusat tidak lagi dapat mengendalikan mutu dari "*Blue-print*" yang mereka buat sendiri. Padahal bila kita lihat lebih terperinci, banyak hal-hal yang ada di "*Blue-print*" tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti yang telah diterangkan.

Ketiga, "*Blue-print*" yang dibuat pemerintah pusat tidak inklusif dalam mewadahi kebutuhan masyarakat yang sangat majemuk. Misalnya, tata ruang yang ada dalam "*Blue-print*" sangat didominasi oleh aspek bencana. Dengan demikian bila penanggulangan dampak tsunami menurut "*Blue-print*" diterapkan secara konsekuen, sebagian besar *collective-memory* penduduk Kota Banda Aceh akan hilang.

Keempat, salah satu alasan agar "*Blue-print*" dapat disahkan oleh presiden dengan segera ialah keterbukaan rencana tersebut terhadap perincian lanjutan oleh masyarakat di tingkat yang lebih rendah. Apakah memang demikian? Bila dana bagi pembangunan kembali Aceh sebagian besar datang dari pihak internasional dan penetapannya melalui peraturan pemerintah, pelaksanaan "*Blue-print*" akan sangat kaku. Hal ini akan mempersempit kemungkinan bagi pengembangan dan interpretasi di level *grass-roots* agar bisa memberi alternatif terhadap "*Blue-print*" tersebut. Sesuai dengan pendapat Arendt akan ada dua kemungkinan bagi Banda Aceh.

Kemungkinan pertama, bila benar presiden akan menandatangani "*Blue Print*" rekonstruksi Aceh, rencana tersebut tentu akan berbentuk peraturan pemerintah. Bila pemerintah berkomitmen bahwa pembangunan kembali Aceh harus bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan transparan, serta harus ada kontrol eksternal dari pendonor internasional, dapat diperkirakan pelaksanaan "*Blueprint*" akan sangat konsekuen dan ketat. Namun, karena "*Blueprint*" tidak didasarkan pada data yang akurat dan tidak memperhatikan hak-hak individu yang sangat dirasakan oleh masyarakat Aceh yang sangat egaliter itu, pelaksanaan "*Blueprint*" akan menyebabkan berbagai konflik horisontal. Sebagai contoh, "*Blueprint*" dibuat tidak didasarkan pada hak-hak masyarakat atas tanah sehingga berbagai masalah tanah akan muncul.

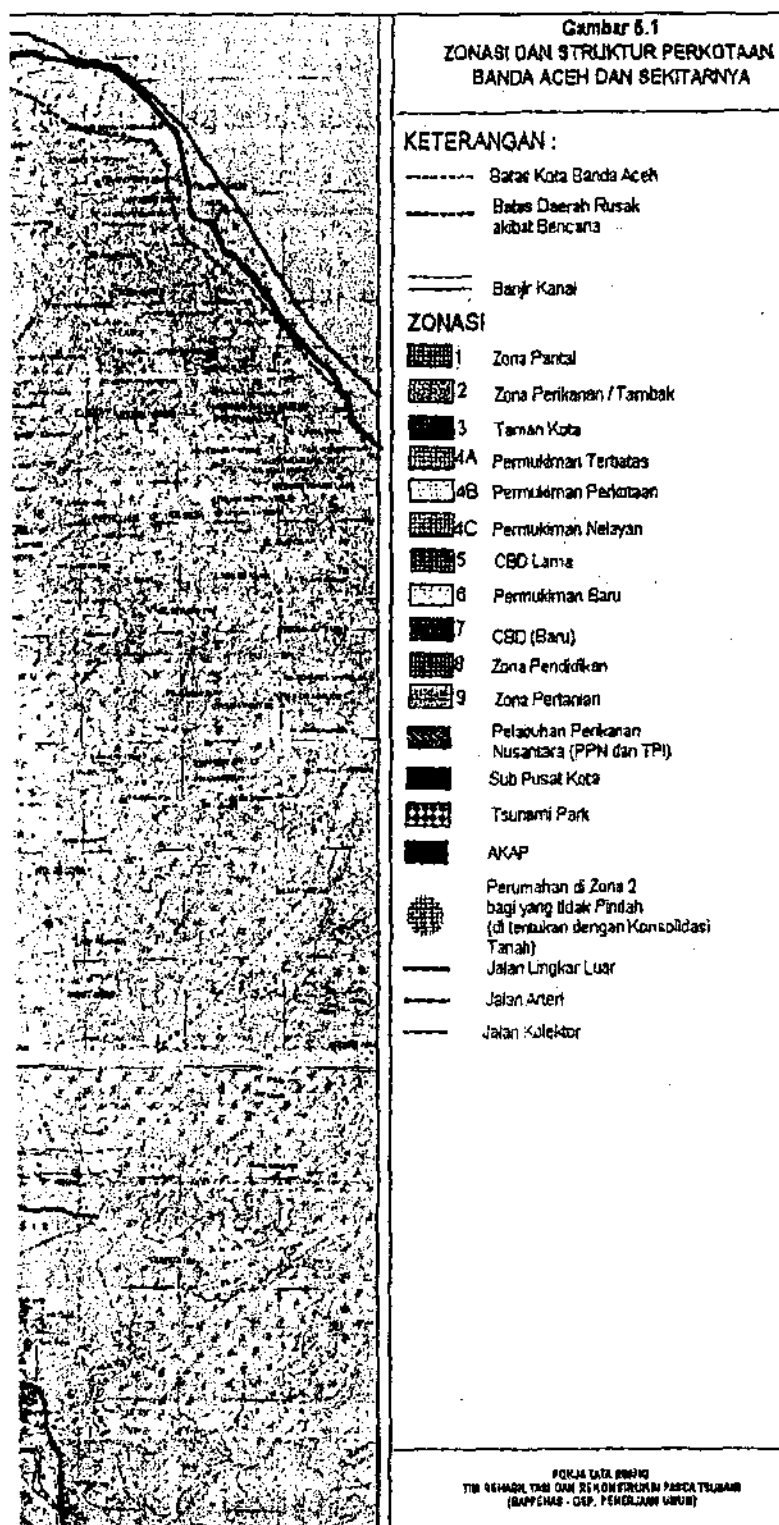
"*Blueprint*" ini dibuat mendahului rekonstruksi hak atas tanah yang dilanda bencana. Dengan demikian dikhawatirkan, banyak rakyat Aceh yang sudah kehilangan sanak-saudara serta harta akan kehilangan pula hak atas tanahnya. Ini mendorong terjadinya

pemiskinan struktural rakyat Aceh. Lantas, bila pelaksanaan "*Blueprint*" dilakukan secara konsekuen, akan timbul konflik antara aparat, terutama aparat pemerintah daerah, dan rakyat yang haknya atas tanah tercerabut oleh ketentuan-ketentuan dalam "*Blueprint*". Dengan kata lain, "*Blueprint*" akan menciptakan "lahan-lahan tak bertuan" dan "rakyat yang tak berlahan". Padahal bagi orang Aceh lahan itu bersifat sakral karena biasanya menjadi tempat kuburan nenek moyang.

Sejalan dengan waktu, fenomena itu akan mengakumulasikan ketidakpuasan masyarakat. Kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan "*Blueprint*" akan menyebabkan alienasi dan juga isolasi bagi sebagian masyarakat yang telah tercerabut hak tanahnya. Kemungkinan itu diperkuat karena luasnya lahan yang terkena dampak pelaksanaan "*Blueprint*". Diperkirakan, bersamaan dengan pelaksanaan rencana itu, Kota Banda Aceh akan kehilangan kemampuan mewadahi pluralitas masyarakat dan berhenti menjadi sebuah kota seperti yang ada dalam idealisme Geddes dan Mumford.

Kemudian, akibat tak jelasnya batas-batas wilayah pemerintahan dalam tata ruang yang ada pada "*Blueprint*", akan muncul konflik antarwilayah. Sebagai contoh, rencana tata ruang dalam "*Blueprint*" tidak memperhatikan batas-batas antara Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Sehingga pemerintah daerah yang mana yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata ruang itu tidak jelas (tak sesuai dengan UU NO. 24/92 tentang tata ruang). Koordinasi antarwilayah dan organisasi di Indonesia yang terkenal sangat buruk akan menjadikan ketidakjelasan batas wilayah dan wewenang pada tata ruang akan meningkatkan potensi konflik antarkabupaten atau kota.





Peta Tata Ruang Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar menurut "Blueprint". Skala peta tak jelas, jenis-jenis ruang hanya berdasarkan aspek dampak bencana semata.

Kemungkinan kedua, kontrol terhadap pelaksanaan "*Blueprint*" bisa saja tidak seketat yang diharapkan dan bahkan pelaksanaannya akan penuh dengan toleransi. Ini akan menghilangkan esensi sebuah rencana yang pada dasarnya berfungsi sebagai alat kontrol pembangunan. Apalagi, pembangunan di Aceh selama ini sangat permisif. Bila fenomena permisif seperti itu terjadi, akan banyak terjadi pelanggaran terhadap "*Blueprint*" oleh masyarakat. Seperti biasanya, pemerintah daerah akan lebih banyak bersikap tutup mata terhadap berbagai pelanggaran tersebut. Sementara itu sikap permisif itu terus berjalan, bisa saja rakyat Aceh berusaha menggugat "*Blueprint*", misalnya melakukan *judicial-review*, *class action* dan lain-lain. Memang, usaha tersebut memerlukan waktu dan biaya yang besar. Dan dalam sejarah Indonesia, usaha rakyat menggugat pemerintah sangat jarang berhasil. Dengan demikian konflik di Aceh akan terus berlanjut. Isolasi dan alienasi yang dirasakan oleh rakyat Aceh, khususnya di Banda Aceh, akan terus mengental. Dalam kondisi itu mustahil Kota Banda Aceh dapat memenuhi idealisme Geddes, Mumford dan lain-lain. Dan akhirnya Banda Aceh akan menjadi kota yang hidup segan mati tak mau, serupa dengan fenomena yang disampaikan oleh Arendt dalam ceramahnya yang berjudul "Man in Dark Time" pada 1968.

Akhirnya, ketat ataupun permisif, pelaksanaan "*Blueprint*" yang tidak memperhatikan definisi kota sebagai tempat bertemunya kemanusiaan yang pluralis akan menimbulkan berbagai konflik. Siapa yang akan menyelesaikan berbagai konflik yang timbul karena pelaksanaan "*Blueprint*" itu? Pemerintah? Pemerintah daerah? Rakyat sendiri? Tapi semua pihak tersebut terlibat dalam konflik, jadi tak bisa menjadi penengah dan penyelesai konflik yang adil dan

benar. Dengan demikian konflik-konflik akibat pelaksanaan "Blueprint" akan tak berujung dan tanpa penyelesaian. Dan konflik yang berkepanjangan akan meningkatkan rasa teralienasi dan terisolasi pada diri rakyat Aceh. Apakah ini yang dikehendaki pemerintah?

Penutup

Alhasil, "Blueprint" yang tidak memperhatikan pluralitas baik dari segi substansi maupun proses berpotensi akan menimbulkan rasa alienasi dan isolasi pada penghuni kota. Pemerintah yang oleh Bentham dianggap elite, penengah berbagai kemungkinan konflik yang diakibatkan oleh pluralitas masyarakat, telah ikut menjadi motor yang mendorong munculnya konflik, bahkan terlibat menjadi pihak yang berkonflik. Rakyat Aceh, khususnya penghuni Kota Banda Aceh, akan merasakan konflik yang berkepanjangan, teralienasi dan terisolasi, membuat kota terpecah-pecah sehingga kota tersebut tidak lagi menjadi wadah bagi pluralitas —hal yang menandai keberadaan sebuah kota.

Acuan

- Arendt, H., "Man in Dark Time", dari sebuah ceramah dalam merayakan Ulang tahun Heidegger kedelapan puluh, 1968.
- Bertram, C., *Rousseau and the Social Contract*, Routledge, London, 2004.
- Goetze, "The Democratic Perspective in the Urban Context", Ph.D. thesis, <http://www.gotzspace.dk>, 1997.
- Kelly, P. J., *Utilitarianism and Distributive Justice: Jeremy Bentham and Civil Law*, Routledge, London, 2004.
- Marcuse, P., "After September 11, Urban Life will not be the Same", dalam Jerman *Journal of Urban Studies* (DfK), Volume 40, No2., 2001.
- Miller, D. L., ed., *The Lewis Mumford Reader*, Pantheon Books, NY, 1986.
- Meller, H., Patrick Geddes, *Social Evolutionist and City Planner*, Routledge, London, 1990.
- Tuan, Yi Fu, *Topophilia, A Study of Environmental Perceptions, Attitudes*, Columbia Unive. Press, 1989.
- Ventury, R., dan Brown, D. S., *Complexity and Contradiction in Architecture*, Rizzoli, NY, 1961.

Print Murah Banda Aceh, Banda Aceh, Indonesia. 241 likes. Spesialis Print Dokumen Harga murah cocok bagi pelajar dan mahasiswa/i. Jln Sultan Malikulsaleh No 36 (Depan Kampus STIEI; Samping Royal Kopi), Lamlagang/Neusu (5,223.92 mi) Banda Aceh, Indonesia 23239. Get Directions. +62 813-6027-3679. Contact Print Murah Banda Aceh on Messenger. harsprinting.webs.com. Business Service. Tempat ngeprint yang murah di banda aceh dengan pelayanan yang profesional dan ramah. Cocok bagi adik-adik yang sedang sekolah atau kuliah. Jln Sultan Malikulsaleh No 36 (Depan Kampus STIEI; Samping Royal Kopi), Lamlagang/Neusu, Banda Aceh, 23239, Indonesia. Get Directions. 081360273679. harsprinting.webs.com. Categories. Business Service. Work hours. Banda Aceh Bed and Breakfast. Banda Aceh Vacation Rentals. Banda Aceh Vacation Packages. Flights to Banda Aceh. Banda Aceh Restaurants. Things to Do in Banda Aceh. Banda Aceh Travel Forum. Banda Aceh Photos. Banda Aceh Map. "Stunning". Once you get past all the plastic bottles and bags on the way you are presented with a superb read more. Reviewed March 19, 2019. Zippdamct.